

**ANALISIS MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
WARGA TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN,
KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Diah Restu Nur Hasanah

NIM 210716137

Pembimbing:

Mughtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH.

NIDN. 2027068103

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Hasanah, Diah Restu Nur. Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat pada Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Sumber daya, pola pemberdayaan, program pemberdayaan dan penyandang keterbelakangan mental.

Penelitian ini berdasarkan pada fenomena sejumlah 97 warga di Desa Karangpatihan sebagai penyandang keterbelakangan mental atau tunagrahita yang masih ketergantungan pada bantuan konsumtif, padahal sudah dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah desa selama 7 tahun. Berdasarkan teori Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memandirikan masyarakat. Model pemberdayaan terhadap warga tunagrahita seharusnya bersifat lebih fleksibel, tidak kaku dan menuntut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai model pemberdayaan yang diterapkan pada masyarakat tunagrahita dan dampak ekonomi yang dirasakannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode perbandingan pola.

Model pemberdayaan yang digunakan pemerintah desa untuk memberdayakan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan adalah menggunakan model pendekatan *top down* atau pendekatan dari atas kebawah. Pemberdayaan yang dilakukan sampai saat ini masih dalam tahap pelatihan. Pelatihan kegiatan usaha yang diberikan kepada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan adalah ternak lele, ternak kambing, pembuatan kerajinan tangan tasbih, pembuatan kerajinan tangan keset dan produksi batik ciprat. Sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan usaha untuk warga tunagrahita diarahkan pada 2 kategori yaitu peternakan dan kerajinan tangan. Selama 7 tahun pemberdayaan sudah ada peningkatan pendapatan dan pergeseran okupasi, yang awalnya warga tunagrahita bekerja sebagai buruh tani dan pengangguran, sekarang sudah menjadi pengrajin dan peternak. Pendapatannya pun sudah terkonsep, yaitu pendapatan harian, pendapatan triwulan dan pendapatan tahunan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1	Diah Restu Nur Hasanah	21071137	Ekonomi Syariah	ANALISIS MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA WARGA TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 27 April 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Linan Roudlotul Janah, M.Ag
NIP. 197507162005012004

Menyetujui,

Muchtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH.
NIDN. 2027068103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat pada Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Nama : Diah Restu Nur Hasanah

NIM 210716137

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.

NIP. 197412111999032002

(.....)

Penguji I :

Agung Eko Purwana, SE., MSI.

NIP. 197109232000031002

(.....)

Penguji II :

Muchtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH.

NIDN. 2027068103

(.....)

Ponorogo, 4 Mei 2020

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Restu Nur Hasanah

NIM : 210716137

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis ~~Progr~~ Model Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2020

Penulis


Diah Restu Nur Hasanah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Restu Nur Halanah
NIM : 210716137
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita di Desa Karangfatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 08 Juni 2020

Penulis,



Diah Restu N. H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Baik dalam hal berkomunikasi, bekerja hingga interaksi untuk dapat bertahan hidup. Sebagai manusia normal, untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup, masih memerlukan bantuan dari orang lain. Apalagi untuk penyandang keterbelakangan mental/ tunagrahita. Tentunya mereka memerlukan dukungan, komunikasi, kasih sayang serta motivasi untuk bertahan hidup. Upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya telah banyak dilakukan, baik untuk kesejahteraan masyarakat secara umum maupun kesejahteraan untuk masyarakat penyandang disabilitas.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹ Mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*”, maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.²

¹ Aprillia Theresia Dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademisi Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 110.

² Ibid., 114.

Melalui pemberdayaan masyarakat yang optimal maka pembangunan ekonomi suatu daerah juga akan meningkat. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.³ Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi ketergantungan dengan berbagai program bantuan dari luar, namun mereka dapat menikmati apa yang menjadi usaha mereka sendiri dan dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya.⁴

Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi penentu untuk menangani masyarakat tunagrahita secara maksimal kedepannya. Pemberdayaan memiliki tujuan dua arah, yang

³ Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 52.

⁴ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1, (Juni 2011), 16.

pertama melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, dan yang kedua memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.⁵

Dalam proses memberdayakan masyarakat, diperlukan suatu pola agar target-target yang ditetapkan dapat terwujud. Pola dalam pemberdayaan masyarakat disebut dengan model pemberdayaan. Pengertian model pemberdayaan adalah pola atau ragam yang digunakan untuk proses menuju berdaya yang diberikan dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang kurang berdaya.⁶ Menurut Wrihatnolo, model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui membangun kesadaran ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas dan pendayaan.

Membangun kesadaran ekonomi masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada target yang akan diberdayakan. Misalnya memberikan penyadaran kepada kelompok ekonomi rendah di masyarakat tentang pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda dan dapat dilakukan jika

⁵ Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 51.

⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 77.

mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Penguatan kapasitas, yaitu memberikan daya atau kuasa, masyarakat harus mampu terlebih dahulu. Setelah masyarakat memiliki kapasitas, terutama kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, proses selanjutnya adalah pendayaan, yaitu pemberian daya dan kekuatan kepada target yang disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang dimiliki masyarakat.⁷

Payne dalam bukunya *Modern Social Work Theory* memaparkan 2 model pemberdayaan. Yaitu model pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*) dan model pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom up*). Model pemberdayaan melalui pendekatan *top down* sering disebut sebagai pendekatan *policy centered*, artinya dalam model pemberdayaan melalui pendekatan *top down* sasaran pemberdayaan hanya menjadi obyek. Kelebihannya, proses pembangunan dapat berjalan cepat dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat pada waktunya. Pendekatan *top down* identik dengan *command and control* keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengatasi atasan kepada bawahan. Konsep *top down* kurang memperoleh partisipasi masyarakat, karena rakyat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Model pemberdayaan melalui pendekatan *bottom up* menuntut adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk mampu melakukan pembangunan secara mandiri. Model pendekatan *bottom up* ini menggunakan konsep

⁷ Randy R. Wrihatnolo Dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2007), 2.

partisipasi sebagai kata kunci. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama oleh masyarakat, sejumlah nilai dan sistim dipahami bersama. Model *bottom up* memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain, model ini menempatkan masyarakat sebagai subyek. Namun model pemberdayaan *bottom up* memerlukan waktu lama untuk mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini berlawanan dengan model pemberdayaan *top down*.

Pemberdayaan yang dilakukan di desa Karangpatihan dalam rangka memberi keahlian warga tunagrahita serta mengurangi jumlah kemiskinan diantaranya adalah dengan pembuatan kerajinan keset, pembuatan kerajinan tangan tasbih, ternak lele, ternak kambing, dan industri batik ciprat yang sudah di distribusikan ke beberapa kota di Indonesia.⁸ Hal tersebut tentunya akan membentuk suatu badan usaha yang berperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan pemerintah untuk memandirikan warga tunagrahita. Agar mereka tidak lagi bergantung terhadap orang lain ataupun bantuan konsumtif dari warga asing serta kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Pelatihan program pemberdayaan dilakukan di Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, diikuti oleh warga tunagrahita dan dalam pendampingan pelatih.

Karena program pemberdayaan ini ditujukan untuk warga tunagrahita, pemerintah setempat tidak melibatkan mereka dalam perencanaan dan

⁸ Eko Mulyadi, Seminar, 2 Desember 2019

pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja dengan pertimbangan kemampuan berfikir warga tunagrahita. Segala bentuk perencanaan program pemberdayaan diputuskan oleh pihak pemberdaya, yaitu pemerintah Desa Karangpatihan tanpa melibatkan warga tunagrahita dalam memutuskannya. Warga tunagrahita berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan, mereka harus melakukan program pemberdayaan sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan pemerintah. Teknik komunikasi yang digunakan adalah satu arah yaitu dari pemerintah desa sebagai pemberdaya kepada warga tunagrahita. Pengalaman warga tunagrahita masih dianggap sangat kurang untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Pemerintah desa menentukan apa, bagaimana dan kapan melaksanakan program pemberdayaan.

Pada awalnya pelaksanaan program pemberdayaan seperti ini cukup efektif diterapkan terhadap warga tunagrahita. Mereka bisa mengikuti berbagai program yang disediakan. Namun semakin lama, muncul suatu hubungan yang timpang. Pihak pemberdaya 'memerintah' sedangkan pihak yang diberdayakan 'diam dan menunggu'. Warga tunagrahita menjalani kehidupan sehari-harinya secara stagnan, tidak berupaya untuk melakukan hal lain agar bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Mereka menunggu perintah dari pemberdaya mengenai apa yang harus dilakukan. Bahkan saat ini ada yang mulai enggan untuk melaksanakan program pemberdayaan, tidak memperdulikan himbauan dari pemerintah desa. Mereka hanya mau datang ke balai pelatihan apabila ada pemberitahuan bantuan datang. Hal ini jelas

menjadi tidak efektif untuk jangka panjang, apalagi agar bisa mencapai tujuan pemberdayaan yaitu memandirikan masyarakat.

Penelitian ini berdasarkan pada fenomena sejumlah 97 warga di Desa Karangpatihan yang tersebar dalam 4 dusun, menyandang keterbelakangan mental atau tunagrahita yang masih ketergantungan pada bantuan konsumtif, padahal sudah dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah desa selama kurang lebih 7 tahun.

Tentunya bukan hal mudah untuk merubah pemikiran warga penyandang tunagrahita tersebut. Namun, bukan tidak mungkin untuk dapat memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Model pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat tunagrahita tentunya berbeda dengan model pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat biasa. Model pemberdayaan terhadap warga tunagrahita seharusnya bersifat lebih fleksibel, tidak kaku dan menuntut, serta tidak mengesampingkan tujuan utama pemberdayaan yaitu untuk memandirikan masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai model pemberdayaan yang diterapkan pada masyarakat tunagrahita dan dampak ekonomi yang dirasakannya. Berdasarkan uraian yang telah di jabarkan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “analisis model pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis model pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah dan juga ilmu yang memuat kajian pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan yang berkaitan dengan masyarakat penyandang keterbelakangan mental/ tunagrahita.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai model pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita, untuk pemerintah Desa Karangpatihan pada khususnya. Penelitian ini juga bisa dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah atau lembaga swasta lain yang berniat untuk memberdayakan masyarakat penyandang keterbelakangan mental, sehingga dampak yang dirasakan memadai.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan dalam lima bab pembahasan, yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, saling berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar pembahasan dalam skripsi yang akan ditulis. Berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam pembahasan latar belakang masalah diuraikan mengenai masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan studi penelitian terdahulu sebagai acuan penulisan skripsi dan kajian terhadap beberapa teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan serta menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Dijelaskan mengenai teori pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat tunagrahita.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjabaran mengenai metode yang digunakan ketika penelitian. Meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV: ANALISIS DATA

Pada analisis data dijelaskan tentang temuan penelitian, yakni penyajian data dari hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah meliputi deskripsi lokasi penelitian yaitu di Desa Karangpatihan, model pemberdayaan yang diterapkan terhadap masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan dan dampak yang dirasakan dari program pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan, serta analisis model dan dampak pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang diartikan sebagai pemberdayaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.¹ Sehingga dengan kata lain masyarakat yang lemah atau kurang beruntung disadarkan dan diberi rangsangan sehingga kehidupan masyarakat tersebut menjadi berdaya.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²

Pengertian “*proses*” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi

¹ Abu Hurairah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Yang Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), 82.

² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, 77.

masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kekuatan/kemampuan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Senada dengan pengertian ini Prijono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada

pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.³

Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu: *Enabling*, yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat. *Empowering*, adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Protecting, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing. *Supporting*, yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. *Fostering*, yaitu memelihara kondisi kondusif

³ Ibid., 77-78.

agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.⁴

Menurut Slamet, pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua individu, kelompok, maupun kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Kelsey dan Hearne menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.⁵

Pengertian pemberdayaan sendiri telah banyak diungkapkan oleh para ilmuwan, pada dasarnya pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri, bebas dari ketergantungan, dapat menciptakan inovasi baru serta mampu mengembangkan tingkat perekonomiannya ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat harus berpusat kepada

⁴ Edi Suharto, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2006), 74-75.

⁵ Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 100.

masyarakat, oleh sebab itu masyarakatlah yang memiliki peranan aktif dalam upaya pemberdayaan tersebut.⁶

2. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.⁷

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (persepsi dari masyarakat itu sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).⁸ Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.⁹

Menurut Joko, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) baik melalui pendidikan formal maupun non formal perlu mendapat prioritas. Dengan

⁶ Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 167.

⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, 80.

⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perubahan* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 110.

⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, 80.

demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menciptakan masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan sehingga kesejahteraan hidupnya meningkat.¹⁰

3. Tahapan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi diawali dengan proses. Proses memberdayakan seseorang atau masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahap:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi seseorang atau masyarakat berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat diri menjadi makin berdaya memanfaatkan peluang.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang lemah semangat. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Contohnya dengan memberikan dorongan dan semangat untuk berubah.¹¹

¹⁰ Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar Proses Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Semarang: Unnes Press, 2007), 153.

¹¹ Gunawan Sumadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Bin Arena Pariwisata, 1997), 165.

Menurut Lippit dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana (*planned change*) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam 7 kegiatan pokok, yaitu:

- a. Penyesadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaan sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik.
- b. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan keadaan sumberdaya (manusia, alam, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya dan aksesstabilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial budaya dan politis.
- c. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- d. Menunjukkan pentingnya perubahan yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan masyarakat, nasional dan global. Karena kondisi lingkungan terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut.
- e. Melakukan pengujian dan demonstrasi, kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu

cocok dengan kondisi masyarakatnya. Selain itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling bermanfaat dengan resiko yang terkecil.

- f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll.) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya.
- g. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihannya, kaitannya dengan aksestabilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, akuntabilitas publik dan penguatan kapasitas lokal.

Tentang hal ini, Tim Delivery menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- Tahap 1. Seleksi lokasi.
- Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat.
- Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat.
 - a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif.
 - b) Pengembangan kelompok.

- c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.
- d) Monitoring dan evaluasi partisipatif.

Tahap 4. Pemandirian masyarakat.¹²

4. Model pemberdayaan masyarakat

Arti kata model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pengertian model pemberdayaan adalah pola atau ragam yang digunakan untuk proses menuju berdaya yang diberikan dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang kurang berdaya. Model pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat adalah melalui program pemberdayaan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas dasar inisiatif aspirasi dari masyarakat. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan.¹³

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Suhartini yaitu, dengan pemberian pendampingan kepada warga, pemberian pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.¹⁴ Sedangkan menurut Wrihatnolo, model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui membangun kesadaran ekonomi masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada target yang akan diberdayakan. Misalnya memberikan penyadaran kepada kelompok ekonomi rendah di masyarakat tentang

¹² Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 123-125.

¹³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, 77.

¹⁴ Suhartini, Dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 14-26.

pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda dan dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Masyarakat sebagai partisipan dalam proses pembangunan ekonomi. Melalui penyadaran terhadap masyarakat dapat mencerahkan mereka untuk mampu mendorong dari dalam membangun ekonomi masyarakat. Selanjutnya penguatan kapasitas, yaitu memberikan daya atau kuasa, masyarakat harus mampu terlebih dahulu. Penguatan kapasitas dapat diberikan secara individu atau kelompok organisasi. Peningkatan kapasitas dapat diberikan melalui pelatihan, *workshop*, konsultasi

i secara individual. Setelah masyarakat memiliki kapasitas terutama sumber daya manusia maka dapat menentukan langkah selanjutnya untuk mengembangkan ekonomi. Proses selanjutnya adalah pendayaan, yaitu pemberian daya dan kekuatan kepada target yang disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang dimiliki masyarakat. Masyarakat diberikan daya dengan memberikan kesempatan sesuai dengan potensinya masing-masing.¹⁵

a. Model pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan, dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial sebagai suatu

¹⁵ Randy R. Wrihatnolo Dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, 2.

strategi pembangunan.¹⁶ Selama ini pemberdayaan didekati dengan berbagai model pendekatan, salah satunya dengan model pendekatan dari atas kebawah (*top down*).

Model *top down* cenderung menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan *policy centered*, artinya dalam model pemberdayaan melalui pendekatan *top down* sasaran pemberdayaan hanya menjadi obyek dari yang akan menerima dan menikmati hasil. Pemberdayaan dilakukan oleh pihak luar dari sekumpulan obyek pemberdayaan.¹⁷

Model *top down* mempunyai kelebihan dimana proses pembangunan dapat berjalan cepat dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat pada waktunya. Namun model pendekatan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan penyediaan dana negara atau pemberdaya dan sangat ditentukan oleh kemauan dan kesungguhan pemberdaya keberlangsungannya. Nyatanya posisi sentral yang mendominasi proses pembangunan ternyata dapat melemahkan masyarakat dan menimbulkan hubungan yang timpang (tidak serasi). Disatu pihak lahir budaya “perintah” dikalangan pelaksana pemberdayaan, dilain pihak akan lahir sikap “diam dan

¹⁶ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), 204.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

menunggu”. Kini dengan semakin kompleksnya bidang dan permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan, semakin disadari bahwa model pemberdayaan *top down* kurang menguntungkan bagi kelangsungan proses pembangunan. Berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dirumuskan dari dan oleh orang luar tanpa melibatkan masyarakat.¹⁸

Secara garis besarnya kegiatan pemberdayaan *top down* dapat dikategorikan menjadi dua fase yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Pada *top down planning*, dari model perencanaan yang dilakukan adalah berasal dari atasan yang ditunjukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemberdayaan, *top down planning* adalah perencanaan yang dibuat oleh pemberdaya yang ditunjukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Kemudian pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai kemauan atasan atau pemberdaya di dalam perencanaan tanpa mempedulikan situasi nyata bagian bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan komunikasi. Biasanya menimbulkan kepatuhan yang terpaksa namun untuk sementara waktu efektif.¹⁹

¹⁸ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti, 204.

¹⁹ Ibid.

Pendekatan *top down* identik dengan *command and control* keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengatasi atasan kepada bawahan. Kelemahan model *top down*: pertama, program-program kesejahteraan yang di desain dibiayai dan dikelola secara sentralistis ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk dapat berhasil, lebih dari apa yang dapat ditanggung oleh birokrasi. Kedua, program-program kesejahteraan semacam ini terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang kaku dan tidak lentur, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan dapat diberikan oleh birokrasi. Konsep *top down* kurang memperoleh partisipasi masyarakat, karena rakyat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

b. Model pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom up*)

Proses pemberdayaan menuntut adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk mampu melakukan pembangunan secara mandiri. Namun modifikasi pendekatan itu tidaklah mudah dan cepat seperti yang diharapkan mengingat model pendekatan *top down* telah mengakar. Seiring dengan permasalahan diatas muncullah model pendekatan yang disebut *bottom up*. Suatu model yang mencoba

²⁰ Sujarwo, *Strategi Pembelajaran Orang Dewasa*, 2015, Makalah, Hlm. 35.

melakukan koreksi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada model pemberdayaan *top down*. Model pendekatan *bottom up* ini menggunakan konsep partisipasi sebagai kata kunci. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan.

Model pendekatan *bottom up* dalam kegiatan pemberdayaan merupakan suatu pengkondisian dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama oleh masyarakat, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model *bottom up* memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain, model ini menempatkan masyarakat sebagai subyek. Pendekatan *bottom up* lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa memiliki dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene nya memang untuk kepentingan mereka sendiri.²¹

Pendekatan *bottom up* memberi kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya. Model *bottom up* membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan. Sehingga dapat dikatakan

²¹ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti, 209.

bahwa model pemberdayaan *bottom up* berlawanan dengan model pemberdayaan *top down*. Selain dari pengertian yang berbeda, pada model inipun memiliki tahapan yang berbeda dengan model *top down*.

Bottom up planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian kegiatan pemberdayaan, *bottom up planning* adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan pemberdaya hanya sebagai fasilitator.²²

Bottom up merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, serta mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan.

5. Dampak pemberdayaan masyarakat

Setiap program pemberdayaan harus memberikan dampak atau implikasi kepada sasaran dari pemberdayaan. Dampak ekonomi selalu menjadi acuan utama keberhasilan dari kebanyakan program pemberdayaan. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi,

²² Ibid., 302.

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan *cultural* dan politis.

Secara etimologis dampak artinya pelanggaran, tubrukan atau benturan. Sedangkan berdasarkan pendekatan secara sosiologis dampak dapat diartikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan sebuah efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²³ Dampak dikategorikan dalam 2 kategori yaitu dampak sosial ekonomi dan dampak sosial budaya.

Dampak yang paling ingin langsung dirasakan oleh masyarakat dari proses pemberdayaan adalah adanya peningkatan ekonomi. Salah satu bentuk dari dampak ekonomi adalah kemudahan masyarakat mengakses sumber-sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang ada di dalam masyarakat bisa saja sumber ekonomi alam, sumber ekonomi yang berasal dari manusia, sumber ekonomi buatan manusia dan yang terakhir adalah kepengusahaan atau pihak yang berinisiatif untuk menggabungkan dan mengkoordinir ketiga sumber sebelumnya.²⁴

Secara umum, dampak sosial merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 374.

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung:Pt Refika Aditama, 2014), 63-64.

wilayah atau area.²⁵ Perubahan lingkungan sosial ekonomi antara lain meliputi peningkatan pendapatan dan pergeseran okupasi atau mata pencaharian pada warga masyarakat. Keberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi dapat dilihat lebih jelas dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Peningkatan pendapatan

Masyarakat yang pada awalnya memiliki penghasilan rendah, dengan adanya program dari pemerintah penghasilan masyarakat tersebut meningkat. Dampak sosial ekonomi yang dimaksud yaitu adanya pemberdayaan yang berlangsung meningkatkan pendapatan keseharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Pergeseran okupasi

Merupakan pergeseran mata pencaharian yang terjadi pada masyarakat serta merupakan bentuk khusus dari fungsi individu dan merupakan dasar bagi seseorang untuk mendapatkan peluang pendapatan atau keuntungan yang sifatnya *continue* dan lebih baik. Pergeseran okupasi berkaitan dengan usaha memperoleh sejumlah pendapatan dengan cara melakukan aktifitas kerja, sehingga dari perubahan sosial ekonomi tersebut masyarakat lebih mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2008), 65.

Sejalan dengan pendapat Swift dan Levin dalam Mardikanto & Soebiato yang menyebutkan bahwa masyarakat yang berdaya salah satunya ditunjukkan dengan ciri masyarakat memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Pemberdayaan pada hakikatnya upaya untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, baik itu mutu ekonomi, sosial, lingkungan, mental dan lain-lain. Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan sesuatu yang menjadi fokus perhatian pembuat program ataupun masyarakat yang menjadi sasaran dari program. Pada biasanya ketertarikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan selain karena minat, dorongan kebutuhan masyarakat terhadap jenis program yang akan dilaksanakan lebih menjadi alasan utama. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya tidak jauh dari peningkatan ekonomi, walaupun masih banyak faktor-faktor atau hal-hal lain yang juga dibutuhkan oleh masyarakat.

Peningkatan ekonomi dapat ditandai oleh beberapa hal, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan juga daya beli masyarakat. Salah satu tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto & Soebiato adalah perbaikan pendapatan (*better income*) yaitu berupa perbaikan bisnis yang

dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.²⁷

B. Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Arni Surwanti dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai penyandang disabilitas yang masih menghadapi persoalan berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini meneliti pihak-pihak yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta konsep pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan. Penelitian ini juga meneliti berbagai permasalahan dan faktor yang mendukung kesuksesan implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif dalam melakukan analisis permasalahan yang ada. Menggunakan data primer yang langsung dikumpulkan dari obyek penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penanggung jawab pelaksana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas memang masih menekankan pada peran Kementerian Sosial, penanganan interdepartemental dan interinstitusi sudah dilakukan, namun peran swasta belum berjalan dengan dengan baik.²⁸

²⁷ Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 52.

²⁸ Arni Surwanti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia” *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1 (Maret 2014).

Studi penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Lutfia Andriana dengan judul “Kesejahteraan Sosial Tunagrahita”. Penelitian ini membahas tentang kondisi kesejahteraan sosial masyarakat tunagrahita di Dusun Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kondisi warga tunagrahita kategori ringan dan sedang dapat dikatakan sejahtera. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas mereka yang masih berfungsi secara sosial, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, membantu orang lain dan lingkungan masyarakat yang memberikan kenyamanan. Berbeda dengan masyarakat tunagrahita kategori berat, mereka tidak bisa dikatakan sejahtera, karena mereka sudah tidak mampu bekerja dan hanya bergantung kepada orang lain.²⁹

Studi penelitian terdahulu yang ketiga adalah tesis yang ditulis oleh Amila dengan judul “Pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita melalui kelompok swadaya masyarakat rumah harapan karangpatihan bangkit”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Ponorogo, dan juga implikasi yang dihasilkan dari adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif

²⁹ Lutfia Andriana, “Kesejahteraan Sosial Tunagrahita,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

dan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk menganalisis dengan menggunakan proses *editing, classifying, verifying, analyzing and concluding*. Hasil penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi warga tunagrahita melalui KSM Rumah Harapan dengan memberikan pelatihan, keterampilan dan pembinaan.³⁰

Studi penelitian terdahulu yang selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Rian Rusdiyanto dengan judul “Pemberdayaan penyandang cacat tunagrahita oleh yayasan Wahana Bina Karya penyandang cacat di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai pendidikan yang diberikan yayasan Wahana Bina Karya penyandang cacat terhadap anak tunagrahita serta faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan anak tunagrahita didasarkan pada *baseline* yang mereka bisa, artinya di yayasan ini mereka ditangani sesuai dengan kemampuan dan minat yang ada, mereka tidak dipaksakan untuk mengikuti kegiatan yang tidak disukai.³¹

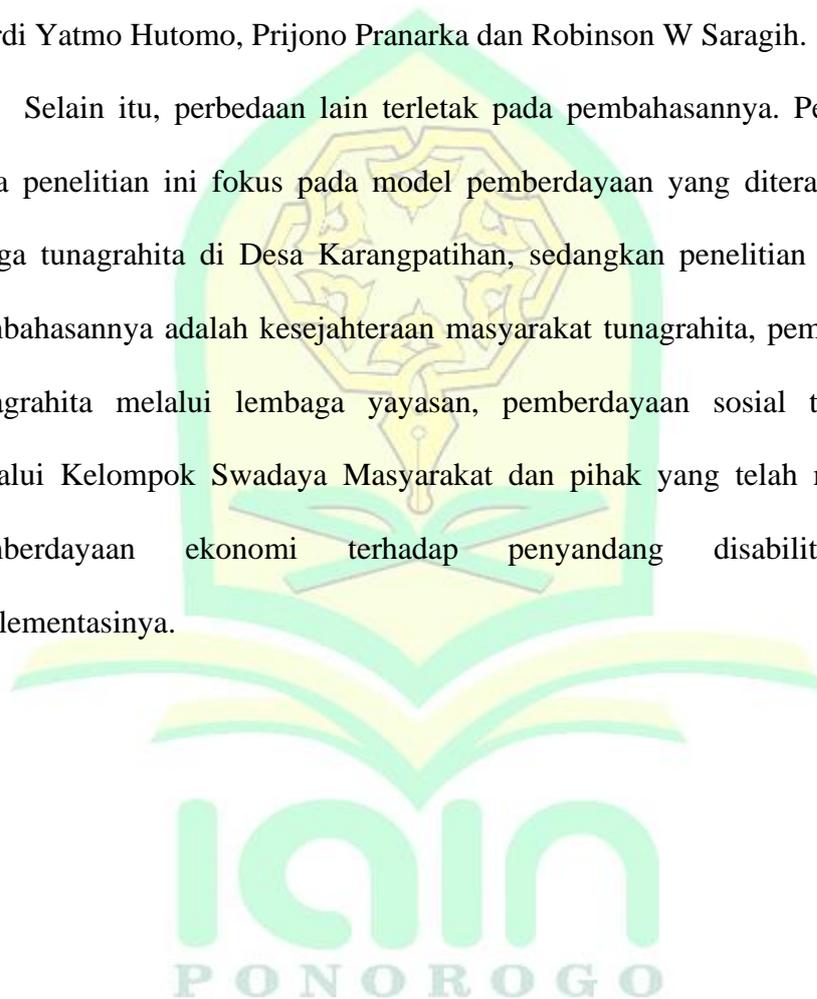
Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti meninjau dari beberapa karya tulis skripsi, tesis dan jurnal. Sehingga dapat diketahui bahwa

³⁰ Amila, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit,” *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

³¹ Rian Rusdiyanto, “Pemberdayaan Penyandang Cacat Tunagrahita Oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penyandang Cacat Di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

pembahasan yang diteliti sama, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Namun, dalam penelitian ini ada yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada teori yang digunakan. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori model pemberdayaan masyarakat dari Malcolm Payne. Sedangkan peneliti terdahulu tersebut menggunakan teori dari Edi Suharto, Mardi Yatmo Hutomo, Priyono Pranarka dan Robinson W Saragih.

Selain itu, perbedaan lain terletak pada pembahasannya. Pembahasan pada penelitian ini fokus pada model pemberdayaan yang diterapkan pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, sedangkan penelitian lain fokus pembahasannya adalah kesejahteraan masyarakat tunagrahita, pemberdayaan tunagrahita melalui lembaga yayasan, pemberdayaan sosial tunagrahita melalui Kelompok Swadaya Masyarakat dan pihak yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap penyandang disabilitas serta implementasinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah model pemberdayaan dan dampaknya terhadap keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan.¹ Sedangkan metode deskriptif adalah metode yang melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta histori tersebut.²

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

² Hadari Nawawi Dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajahmada University, 1994), 73.

gejala tertentu.³ Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.⁴ Pada dasar penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui model dan dampak program pemberdayaan pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih lokasi ini karena 97 warganya merupakan tunagrahita, sehingga dikenal dengan nama kampung idiot. Dengan klasifikasi tunagrahita ringan, sedang dan berat, model pemberdayaan yang diterapkan seharusnya menyesuaikan dengan kondisi mereka. Maka dari itu penulis melakukan penelitian di desa ini untuk mengetahui mengapa hal tersebut terjadi.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam menyusun penelitian ini diantaranya:

- a. Proses pemberdayaan masyarakat pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), 120.

⁴ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003), 1.

- b. Dampak pemberdayaan masyarakat pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁵ Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Karangpatihan, Kepala Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit dan warga tunagrahita.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, bisa melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen yang menjelaskan terkait warga tunagrahita di Karangpatihan, profil Desa Karangpatihan serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan warga tunagrahita.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengumpulan data sebagai berikut:

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 89.

⁶ *Ibid.*, 90.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁷ Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data dari informan. Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan kepala desa Karangpatihan.

2. Observasi

Metode observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer dan suatu cara yang bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.⁸ Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada kondisi lingkungan masyarakat, sarana prasarana yang tersedia serta mengamati aktivitas warga tunagrahita. Hal ini dilakukan untuk mengetahui model dan dampak dari pemberdayaan yang dilakukan pemerintah setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis.⁹ Data tambahan terdokumentasi yang digunakan penulis adalah menggunakan data Desa Karangpatihan berupa profil desa Karangpatihan, jumlah penyandang tunagrahita, identitas warga penyandang tunagrahita, serta beberapa foto ketika penulis berada di lokasi, foto aktivitas warga

⁷ Ibid., 135.

⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237.

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 240.

tunagrahita, foto kegiatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita dan sebagainya.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.¹⁰

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹¹

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

¹⁰ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 16.

¹¹ Ibid., 17.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis juga dibantu dengan teori dasar yang dipilih untuk melakukan penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan diaplikasikan dengan poin-poin dari teori yang digunakan dan kemudian disajikan secara sistematis agar mudah dipahami. Model analisis ini dikenal dengan metode perbandingan pola dimana teknik tersebut membandingkan antara pola dari bukti empiris dengan pola terprediksi.¹²

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Yaitu cara pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan.¹³

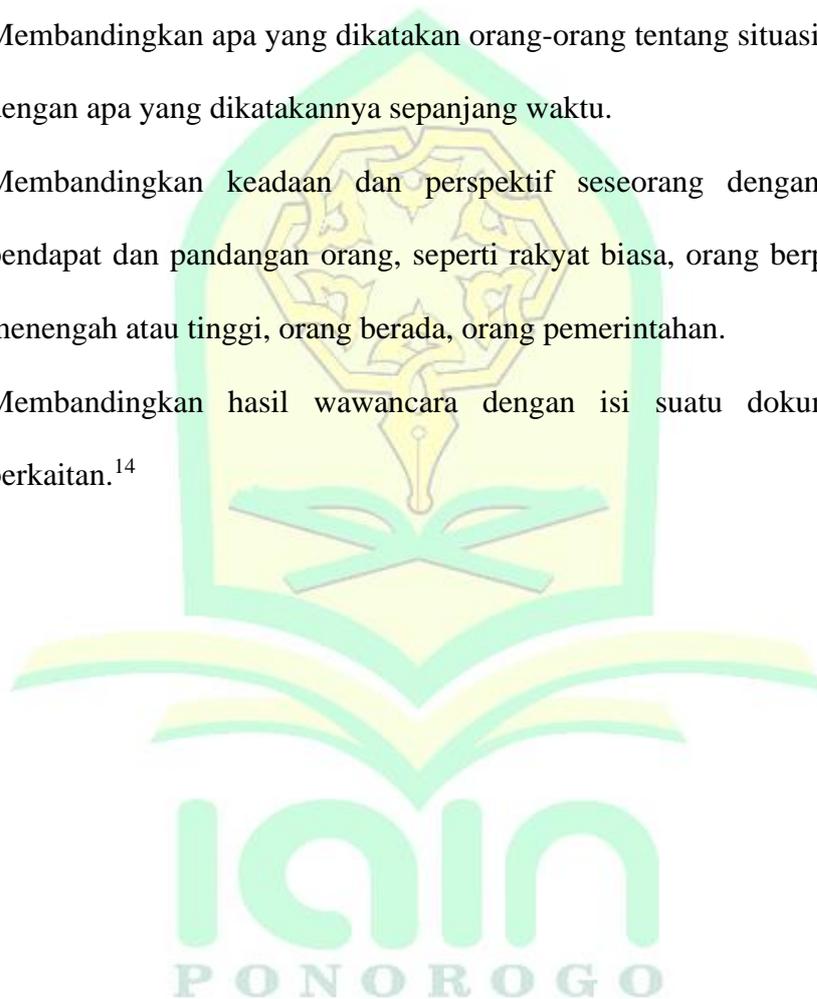
Pada teknik triangulasi, peneliti menggunakan pemeriksaan melalui sumber lainnya, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat

¹²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), 330.

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁴



¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-331.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Demografi

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti terletak di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan letak geografis, Desa Karangpatihan berada di wilayah selatan Kabupaten Ponorogo yang secara administratif memiliki luas wilayah $\pm 1.336,6$ hektar, dan ketinggian wilayah 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl (diatas permukaan laut). Kondisi cuaca dan klimatologi di Desa Karangpatihan memiliki suhu rata-rata harian 31°C .¹

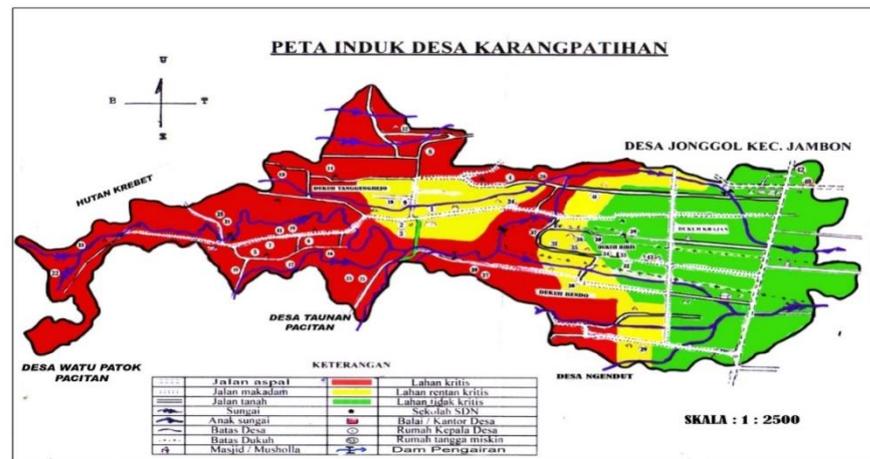
Desa Karangpatihan terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Bendo, Dusun Krajan, Dusun Tanggungrejo dan Dusun Bibis. Adapun batas-batas wilayah Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Jonggol Kecamatan Jambon
Sebelah Selatan	: Desa Ngendut Kecamatan Balong
Sebelah Barat	: Hutan Negara/Kabupaten Pacitan
Sebelah Timur	: Desa Sumberejo Kecamatan Balong ²

Batas-batas Desa Karangpatihan dapat dilihat dengan lebih jelas pada gambar 4.1 berikut ini:

¹ Profil Desa Karangpatihan, 2016.

² Ibid.



Gambar 4.1: Peta Desa Karangpatihan³

Jumlah penduduk Karangpatihan pada tahun 2019 adalah 5.812 jiwa, yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 2.798 jiwa dan perempuan 3.014 jiwa. Lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1: Data Penduduk Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2019⁴

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
		Jiwa	KK	Laki-Laki	Perempuan
1	Bendo	1181	427	564	617
2	Bibis	763	245	406	357
3	Krajan	1353	453	665	688
4	Tanggungrejo	2515	693	1163	1352
	Jumlah	5812		2798	3014
	% thd jml pddk total				

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2018/2019

Desa Karangpatihan memiliki julukan Kampung Idiot. Sebutan ini muncul pertama kali pada tahun 2008 setelah kondisi 400 warganya terkonfirmasi sebagai warga keterbelakangan mental atau tunagrahita.

³ Ibid.

⁴ Profil desa karangpatihan, 2018-2019

Kemudian ada media yang mengangkat fenomena tersebut, hingga masyarakat lain ikut memberi sebutan Desa Karangpatihan sebagai kampung idiot.

2. Kondisi sumber daya alam

Kondisi tanah di desa ini tergolong tandus, yang mana ketika ditanami hasilnya tidak maksimal. Sehingga meskipun sumber daya alam yang ada terbilang banyak, kendalanya terdapat pada kondisi tanah yang tidak produktif dan kualitas air yang tidak bagus. Kondisi potensi alam di Desa Karangpatihan cukup bervariasi meliputi bahan galian (batu), mata air (mata air, sumur, dan air gunung), hasil bumi (mangga, jagung, padi, jeruk, kayu jati, kacang, melon, dll), wisata alam (hutan pinus dan curug). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 4.2: Data Monografi Sumber Daya Alam
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016⁵*

No.	Nama Dusun	Jenis Sumber Daya Alam			
		Bahan Galian	Mata Air	Hasil Bumi	Wisata Alam
1	Bendo		Mata Air	Mangga	Wisata Beji
			Sumur	Jeruk	
				Jagung	
				Kacang	
				Padi	
2	Bibis		Sumur	Mangga	
				Jeruk	
				Melon	
				Padi	

⁵ Profil Desa Karangpatihan, 2016

				Kacang	
				Kakao	
				Pisang	
				Cabai	
				Singkong	
3	Krajan		Sumur	Padi	
				Mangga	
				Kacang	
				Jagung	
				Singkong	
4	Tanggungrejo	Batu	Sumur	Jeruk	Hutan Pinus
			Kali	Mangga	Air terjun
			Air gunung	Sayuran	
				Kacang	
				Pisang	
				Padi	
				Jagung	
				Singkong	

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

B. Data

1. Model pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Semenjak tahun 2008 Desa Karangpatihan dikenal sebagai Kampung Idiot. Sebutan Kampung Idiot tersebut pertama kali muncul di artikel setelah fenomena 400 warganya terkonfirmasi sebagai warga keterbelakangan mental atau tunagrahita. Setelah itu, masyarakat luar Karangpatihan lebih mengenalnya sebagai Kampung Idiot.

Saat ini, berdasarkan data penduduk Desa Karangpatihan tahun 2019 dari 5.812 jiwa warga, terdapat 97 warganya sebagai penyandang

tunagrahita. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari klasifikasi tunagrahita ringan, sedang dan berat. Tunagrahita merupakan orang-orang yang memiliki hambatan intelektual, tetapi mereka juga masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁶

Dari 97 warga penyandang tunagrahita, tunagrahita berat adalah jumlah paling sedikit di Desa Karangpatihan. Tunagrahita berat sudah tidak bisa diberdayakan sama sekali, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar saja mereka harus bergantung kepada orang lain. Meskipun begitu, pemerintah desa membuat kebijakan dengan memberikan *supplay* sembako berupa beras setiap bulan untuk membantu keluarganya. Berikut cuplikan wawancara dengan Pak Eko:

“Tunagrahita berat sudah ndak bisa diberdayakan. Namanya berat kan, sudah tidak bisa apa-apa. Untuk kebutuhan dasar saja mereka harus dibantu oleh keluarganya kan. Tapi kita tetep memberikan *supplay* beras kepada mereka setiap bulan”.⁷

Warga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan tersebar di 4 dusun, yaitu Dusun Tanggungrejo, Dusun Bibis, Dusun Bendo dan Dusun Krajan. Penyandang keterbelakangan mental atau tunagrahita di Desa Karangpatihan sebelum adanya pemberdayaan, bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang ada.

“Pernah suatu hari ada mobil datang ke sini mbak, mereka lari-lari menuju mobil itu, dikira mau ngasih bantuan.”⁸

⁶ Nunung Apriyanto, *Seluk Beluk Tunagrahita Dan Strategi Pembelajarannya*, 11.

⁷ Eko Mulyadi, Wawancara, 20 Maret 2020

⁸ Ibid.

Berdasarkan penuturan Pak Eko tersebut, kondisi warga tunagrahita sebelum adanya pemberdayaan bisa dibilang memprihatinkan. Hanya mengandalkan keberlangsungan hidupnya pada keluarga mereka dan juga bantuan konsumtif dari pihak ketiga. Ada beberapa yang bekerja sebagai buruh tani, tetapi hasil tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap habis masa panen di desa tersebut, para tunagrahita tidak lagi memiliki pekerjaan. Mereka menjadi pengangguran dan hanya bisa berjalan-jalan tanpa mendapatkan penghasilan. Terlebih, keadaan ini ditunjang pula oleh kondisi mereka sebagai tunagrahita yang tidak memungkinkan bekerja menggunakan kecerdasannya. Hal itulah yang kemudian membuat pemerintah desa dan masyarakat bergerak untuk melakukan pemberdayaan terhadap warga tunagrahita. Harapannya, tentu untuk menjadikan warga tunagrahita mandiri, dengan keterampilan yang dilatih melalui program pemberdayaan.

Pemberdayaan di Desa Karangpatihan mulai dilakukan tahun 2010, saat itu Pak Eko belum menjabat sebagai kepala desa. Beliau sebagai ketua organisasi masyarakat yang mengajak pemuda desa untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap warga tunagrahita.

“Pemberdayaan itu sudah ada sebelum saya jadi kepala desa. Karena saya melakukan pemberdayaan itu mulai 2010, saya ketuanya kelompok. Jadi saya menjadi ketua ormas, kemudian saya mengurus tentang pemberdayaan di desa ini pada tahun 2010. Tapi hanya ikan aja, nggak ada yang lain, ikan lele. Setelah saya jadi kepala desa 2013, terus banyak yang dikembangkan”⁹

⁹ Ibid.

Berdasarkan penuturan Pak Eko tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan di Desa Karangpatihan lahir dari kepeduliannya terhadap kondisi warga tunagrahita di desa tersebut. Program pemberdayaan yang dilakukan pertama kali adalah ternak ikan lele. Lalu pada tahun 2011 mendapatkan bantuan dana CSR Bank Indonesia Kediri, yang kemudian digunakan untuk membuat kolam lele di setiap depan rumah keluarga tunagrahita. Semenjak 2013, tepatnya saat Pak Eko sudah resmi menjadi Kepala Desa, program pemberdayaannya pun semakin dikembangkan.

Pelatihan program-program pemberdayaan dilakukan di RHKB (Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit). RHKB berdiri sejak tahun 2013, didirikan oleh masyarakat setempat untuk memfasilitasi warga miskin tunagrahita supaya mendapatkan pelatihan. Tanah untuk mendirikan RHKB merupakan tanah wakaf dari salah satu warga Desa Karangpatihan yaitu Pak Wagiman. Modal untuk pemberdayaan warga tunagrahita berasal dari donatur, swadaya masyarakat, sumbangan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*), seperti yang dikatakan Pak Samuji, sebagai berikut:

“Modal awal pemberdayaan ini berasal dari donatur, sumbangan orang-orang desa sekitar sini, ada juga dari CSR. Alhamdulillah, pemerintah belum memberikan dana untuk pemberdayaan warga tunagrahita sampai saat ini. Kami pun bertekad untuk bisa mandiri, tanpa meminta.”¹⁰

¹⁰ Samuji, Wawancara, 16 Maret 2020

Pernyataan Pak Samuji tersebut dikuatkan oleh penuturan Pak Eko dalam penggalan wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020 dengan peneliti, bahwasanya:

“Dana pemberdayaan berasal dari pemerintah desa, CSR, donasi dan relawan.”¹¹

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Samuji dan Pak Eko dapat disimpulkan bahwa modal awal melakukan program pemberdayaan ini berasal dari donatur, sumbangan warga, CSR, pemerintah desa dan relawan. Hal ini mempermudah pelaksanaan program pemberdayaan.

Terkait modal dikatakan Pak Samuji bahwa saat ini perputaran dananya berasal dari usaha yang mereka jalankan. Sebagian untuk upah para tunagrahita, sebagian lainnya digunakan untuk penambahan modal. Berikut penggalan wawancaranya:

“1 keset itu dihargai Rp. 8000 kepada tunagrahita, lalu dijual kembali Rp. 15.000. Hasil dari penjualannya dimasukkan lagi kedalam kas rumah harapan. Penjualan produk-produk program pemberdayaan tersebut dilakukan ketika ada kunjungan/baksos. Biasanya acara-acara seperti itu dilakukan di rumah harapan.”¹²

Program pemberdayaan di Desa Karangpatihan mulai dikembangkan sejak tahun 2013, tepatnya semenjak Pak Eko dilantik menjadi Kepala Desa. Proses pemberdayaan cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan pemberdayaan pada umumnya, karena yang

¹¹ Eko Mulyadi, Wawancara, 20 Maret 2020

¹² Samuji, Wawancara, 16 Maret 2020

diberdayakan adalah masyarakat tunagrahita. Seperti yang dikatakan Pak

Eko sebagai berikut:

“Lama memang, pokoknya kita dari 2013 sampai sekarang itukan masih proses pelatihan ya. Ada yang baru bisa, ada yang dua bulan bisa, ada yang sampai dua tahun baru bisa. Macem-macem, tergantung individunya.”¹³

Penuturan tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Samuji mengenai kinerja para tunagrahita, sebagai berikut:

“Kemampuan mereka untuk bekerja itu ndak bisa dihitung secara matematis mbak. Kemampuan mereka untuk membuat keset (misalnya), dalam sehari ini mereka mampu membuat satu keset, belum tentu besoknya mampu menyelesaikan satu keset lagi. Sehingga jumlah akhir dari keset-keset tersebut tergantung pada kemauan dan kemampuan para tunagrahita. Ya maklum, memang mereka berbeda dengan kita.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pemberdayaan yang dilakukan tahun 2013 sampai saat ini masih dalam tahap pelatihan. Waktu yang dibutuhkan warga tunagrahita untuk bisa mengikuti program pemberdayaan berbeda-beda, tergantung kemampuan individu. Begitu pula dengan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan tidak bisa dihitung secara matematis karena tergantung dengan kemauan dan kemampuan warga tunagrahita.

Dalam rangka menumbuhkan keterampilan warga tunagrahita agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, pemerintah desa memberikan pelatihan kegiatan usaha yang bertempat di Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Berdasarkan hasil wawancara dan juga

¹³ Ibid.

¹⁴ Samuji, Wawancara, 16 Maret 2020

pengamatan peneliti, pelatihan kegiatan usaha yang diberikan kepada warga tunagrahita adalah sebagai berikut:

a. Budidaya ternak lele

Berawal dari inisiatif Pak Eko tahun 2010 yang mengajak pemuda desa untuk memberdayakan warga tunagrahita. Kemudian mendapat bantuan dana dari CSR Bank Indonesia Kediri pada tahun 2011, lalu dibuatlah pelatihan beternak lele. Setiap keluarga tunagrahita dibuatkan kolam lele kecil dengan ukuran 1x2 m, kemudian diberikan pendampingan mulai proses pemberian pakan, menguras kolam dan memanen ikan lele. Dari beternak lele, keluarga tunagrahita bisa mendapatkan penghasilan Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 setiap panen.

b. Budidaya ternak kambing

Teknik pelatihan yang digunakan dari pengurus untuk ternak kambing adalah dengan cara penyuluhan, yaitu memberikan 1 ekor kambing kepada setiap keluarga miskin tunagrahita. Ada 5 ekor kambing yang digilir dan dipelihara bergantian. Setelah kambing beranak, anak kambing tersebut menjadi hak milik pemelihara, sedangkan induknya digilir untuk dipelihara keluarga selanjutnya.

c. Kerajinan tangan keset

Setelah berjalannya kegiatan ternak lele dan kambing, selanjutnya dikembangkan konsep kegiatan usaha lain agar bisa mendapatkan hasil produksi harian atau mingguan. Sehingga dibuatlah pelatihan membuat

kerajinan tangan berupa keset. Modal berasal dari donasi dan swadaya masyarakat, bahan dasarnya adalah kain perca atau kain sisa dari penjahit. Satu buah keset yang sudah jadi akan dijual seharga Rp. 15.000, upah tunagrahita senilai Rp. 8.000 per keset, sisa hasil penjualan dimasukkan kedalam kas Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit untuk perputaran modal selanjutnya.

d. Kerajinan tangan tasbih

Pelatihan dikembangkan lagi dengan membuat kerajinan tangan tasbih. Tasbih dibuat dari manik-manik kecil yang dirangkai menggunakan benang. Warga tunagrahita dilatih merangkai dan menghitung hingga berjumlah 33. Namun, banyak yang mengalami kesulitan untuk berhitung, sehingga tasbih yang dihasilkan tidak berjumlah 33. Ada yang melebihi 33 buah dan ada yang kurang dari 33 buah. Akhirnya dibuatlah keputusan untuk pembuatan tasbih hanya dilakukan oleh warga tunagrahita yang mampu berhitung.

e. Kerajinan batik ciprat

Warga tunagrahita dilatih mulai dari persiapan pemanasan cat, pembuatan batik dengan diciprat-ciprat menggunakan kuas, pemberian *watergloos*, pencucian dan pengeringan. Dalam pembuatan batik ini memerlukan beberapa tehnik, sehingga prosesnya sesuai dengan tehnik yang dijelaskan. Pembuatan batik ciprat oleh tunagrahita masih dalam pendampingan. Hasil produksi batik ciprat telah didistribusikan hingga

kancah nasional. Namun hingga saat ini, produksi batik ciprat masih menggunakan sistim *made by order*.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan usaha untuk warga tunagrahita diarahkan pada 2 kategori yakni peternakan dan kerajinan tangan. Hal ini dilakukan karena untuk mengembangkan pertanian, terkendala kondisi tanah yang tandus dan kualitas air yang tidak bagus.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pemerintah setempat tidak melibatkan warga tunagrahita dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja dengan pertimbangan kemampuan berfikir warga tunagrahita.

“Kita buat jadwal pelatihan buat mereka mbak, mereka tinggal ngikutin arahan dari kita. Kapan mulai pelatihan, bagaimana caranya mereka tinggal ikut kita.”

Dari penggalan wawancara diatas dapat diketahui bahwa warga tunagrahita berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan, mereka harus melakukan program pemberdayaan sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan pemerintah. Tehnik komunikasi yang digunakan adalah satu arah yaitu dari pemerintah desa sebagai pemberdaya kepada warga tunagrahita. Pemerintah desa menentukan apa, bagaimana dan kapan melaksanakan program pemberdayaan.

Pada dasarnya, warga tunagrahita dengan kategori ringan dan sedang mampu diberikan pelatihan, namun ada saja dari mereka yang

enggannya melaksanakannya. Hal tersebut berdasarkan penuturan Pak Samuji:

“Tapi tetep ada mbak yang nggak mau mengikuti program pemberdayaan seperti ini. Kalau ada pemberitahuan bantuan, baru mau datang. Padahal masih muda dia. Ada juga yang seumuran dengan sampean, dikirim ke SLB diluar kota. Pulang-pulang, malah buat keset itu sudah lupa dia, padahal sebelum berangkat sudah lumayan bisa.”¹⁵

Dari penggalan wawancara dengan Pak Samuji tersebut, dapat diketahui bahwa ada dari mereka yang tidak mau melakukan program pemberdayaan seperti biasanya. Pendampingan dan pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak dihiraukan, dan hanya mau hadir ke rumah harapan atau balai desa apabila ada pemberitahuan bantuan datang dari pihak ketiga. Ada pula yang melakukan program pemberdayaan dengan asal-asalan, sehingga hasilnya tidak sesuai standar untuk bisa dipasarkan.

2. Dampak pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Pemberdayaan bagi warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Mereka yang sebelum adanya pemberdayaan bekerja sebagai buruh tani, ada juga sebagian yang menganggur dan hanya berjalan-jalan saja. Diharapkan setelah

¹⁵ Ibid.

dilakukannya pemberdayaan ada peningkatan pendapatan ekonomi dan pergeseran mata pencaharian.

Selama 7 tahun pemberdayaan, dampak ekonomi yang dirasakan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan cukup terasa. Seperti yang dikatakan Pak Eko sebagai berikut:

“Dampaknya sudah terlihat lama, *wong* kita sudah 7 tahun kok, sudah mandiri mereka. Artinya kalau dulu mereka susah nyari duit, susah nyari makan, mereka sekarang sudah bisa beli makan sendiri”¹⁶

Dari penggalan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa saat ini, setelah 7 tahun pemberdayaan dilakukan di Desa Karangpatihan, dampak secara ekonomi sudah terasa. Mereka yang masih bekerja sebagai buruh tani, setelah habis masa panen masih bisa mendapatkan uang dengan melakukan program pemberdayaan yang telah dilatihkan. Mereka sudah bisa mendapatkan uang dengan tidak bergantung kepada profesi sebagai buruh tani. Sehingga ketika usai masa panen, mereka tidak perlu menganggur lagi. Untuk pendapatan harian bisa mereka dapatkan dari hasil membuat kerajinan tangan tasbih ataupun kerajinan tangan keset.

Untuk 1 *item* tasbih yang berhasil diselesaikan, mereka mendapat uang sebesar Rp. 2.500 sebagai upah. Lalu dari keset yang berhasil mereka kerjakan, mereka mendapat upah sebesar Rp. 8.000. Segala keperluan untuk membuat keset dan tasbih sudah disiapkan. Warga tunagrahita hanya perlu belajar membuat kemudian menyelesaikannya. Produk yang telah berhasil dibuat dipasarkan melalui wisata Gunung Beruk dan ketika ada

¹⁶ Eko Mulyadi, Wawancara, 20 Maret 2020

bakti sosial di Desa Karangpatihan. Hasil penjualan produk yang dibuat para warga tunagrahita dimasukkan ke dalam kas Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit untuk perputaran modal selanjutnya. Besarnya pendapatan harian warga tunagrahita dapat dihitung berdasarkan jumlah *item* yang berhasil mereka selesaikan.

Penghasilan dari beternak ikan lele bisa mereka dapatkan setiap 3 bulan sekali, yaitu ketika masa panen tiba. Bibit ikan lele dan pakan lele pada awal pemberdayaan disiapkan oleh pemerintah desa selaku pemberdaya. Penghasilan yang mereka dapatkan dari beternak ikan lele adalah antara Rp.100.000 – Rp.250.000 setiap kali panen. Sebagian dari penghasilan itu kemudian diarahkan untuk dibelikan pakan lele dan bibit ikan lele.

Dari beternak kambing, warga tunagrahita bisa mendapatkan penghasilan biasanya setahun sekali. Yaitu saat kambing yang dipelihara sudah berkembang biak, anak kambingnya bisa mereka pelihara, sedangkan induknya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan untuk batik ciprat, karena ini merupakan produk baru dibandingkan dengan program pemberdayaan lainnya, dan sistim produksinya masih *made by order*, sehingga pembagian hasilnya pun menyesuaikan banyaknya pesanan pada waktu itu. Pemasaran untuk batik ciprat sudah mencapai kancah nasional, sudah dijual ke beberapa kota di Indonesia. Meskipun pesanan tidak datang setiap hari, namun hal ini sudah merupakan suatu pencapaian yang bagus.

C. Analisis Data

1. Analisis model pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangpatihan dilakukan pertama kali pada tahun 2010. Berdasarkan data penduduk Desa Karangpatihan tahun 2019 dari 5.812 jiwa warga, terdapat 97 warganya sebagai penyandang tunagrahita. Pemberdayaan ditujukan kepada warga tunagrahita ringan dan sedang. Tunagrahita berat sudah tidak bisa diberdayakan sama sekali, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar saja mereka harus bergantung kepada orang lain. Meskipun begitu, pemerintah desa membuat kebijakan dengan memberikan *supplay* sembako berupa beras setiap bulan untuk membantu keluarganya.

Pemberdayaan yang dilakukan, sampai saat ini masih dalam tahap pelatihan. Waktu yang dibutuhkan warga tunagrahita untuk bisa mengikuti program pemberdayaan berbeda-beda, tergantung kemampuan individu. Begitu pula dengan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan tidak bisa dihitung secara matematis karena tergantung dengan kemauan dan kemampuan warga tunagrahita.

Dalam rangka menumbuhkan keterampilan warga tunagrahita agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, pemerintah desa memberikan pelatihan kegiatan usaha yang bertempat di Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Pelatihan program-program pemberdayaan dilakukan di RHKB (Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit) yang sudah

berdiri sejak tahun 2013, didirikan oleh masyarakat setempat untuk memfasilitasi warga miskin tunagrahita mendapatkan pelatihan. Tanah untuk mendirikan RHKB merupakan tanah wakaf. Sedangkan modal untuk pemberdayaan warga tunagrahita berasal dari donatur, swadaya masyarakat, sumbangan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan hasil wawancara dan juga pengamatan peneliti, pelatihan kegiatan usaha yang diberikan kepada warga tunagrahita adalah ternak lele, ternak kambing, pembuatan kerajinan tangan tasbih, pembuatan kerajinan tangan keset dan produksi batik ciprat. Sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan usaha untuk warga tunagrahita diarahkan pada 2 kategori yakni peternakan dan kerajinan tangan. Hal ini dilakukan karena untuk mengembangkan pertanian, terkendala kondisi tanah yang tandus dan kualitas air yang tidak bagus.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pemerintah setempat tidak melibatkan warga tunagrahita dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja dengan pertimbangan kemampuan berfikir warga tunagrahita. Warga tunagrahita berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan, mereka harus melakukan program pemberdayaan sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan pemerintah. Teknik komunikasi yang digunakan adalah satu arah yaitu dari pemerintah desa sebagai pemberdaya kepada warga tunagrahita. Pemerintah desa menentukan apa, bagaimana dan kapan melaksanakan program pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diadakannya pemberdayaan terhadap warga tunagrahita adalah untuk mendidik, membina dan melatih warga tunagrahita sehingga mereka dapat memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak bergantung pada bantuan konsumtif. Lebih singkatnya adalah untuk membuat mereka bisa hidup mandiri secara ekonomi.

Sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Payne dalam bukunya Teori Pekerjaan Sosial Modern yang membagi model pemberdayaan dalam 2 kategori yaitu *top down* dan *bottom up*, maka berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa model pemberdayaan terhadap warga tunagrahita di Desa Karangpatihan adalah menggunakan model *top down* atau model pemberdayaan dari atas ke bawah.

Seperti yang telah tertulis pada BAB II, bahwa dalam model *top down* pemberdayaan dilakukan oleh pihak luar dari sekumpulan obyek pemberdayaan. Artinya, dalam model ini pemberdayaan dilakukan dengan prosentase partisipasi yang tidak banyak. Masyarakat adalah obyek dalam pemberdayaan, bukan subyek pemberdayaan. Hal ini terbukti dengan tidak ikut andilnya masyarakat tunagrahita dalam pengambilan keputusan dalam pemberdayaan dan pemecahan masalah yang mereka hadapi, yaitu keterbelakangan dan kemiskinan.

Tentu masalah ini dipertimbangkan oleh pemerintah desa karena kondisi mereka sebagai penyandang tunagrahita, sehingga akan sulit

untuk berkomunikasi dan berdiskusi bersama. Pada awalnya pelaksanaan program pemberdayaan seperti ini cukup efektif diterapkan terhadap warga tunagrahita. Mereka bisa mengikuti berbagai program yang disediakan. Namun semakin lama, muncul suatu hubungan yang timpang. Warga tunagrahita menjalani kehidupan sehari-harinya secara stagnan, tidak berupaya untuk melakukan hal lain agar bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Mereka menunggu perintah dari pemberdaya mengenai apa yang harus dilakukan. Bahkan saat ini ada yang mulai enggan untuk melaksanakan program pemberdayaan, tidak memperdulikan himbauan dari pemerintah desa. Selain itu, ada juga yang melakukan program pemberdayaan dengan asal-asalan. Hal ini diketahui karena pada awalnya sudah bisa mengikuti pemberdayaan dalam pembuatan produk, namun sekarang kualitas kinerjanya berkurang. Hal ini jelas menjadi tidak efektif untuk jangka panjang, apalagi agar bisa mencapai tujuan pemberdayaan yaitu memandirikan masyarakat.

2. Analisis dampak pemberdayaan masyarakat pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi bagi warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan peternakan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ditetapkannya pelatihan pada bidang keterampilan dan peternakan merupakan pertimbangan kondisi tanah yang tandus dan kualitas air yang tidak bagus. Perkembangan ekonomi warga tunagrahita setelah adanya

program pemberdayaan memberikan dampak pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Memiliki pekerjaan

Tentunya pekerjaan yang mereka miliki adalah dalam kategori peternakan dan kerajinan tangan, meskipun sampai sekarang masih ada yang melakoni buruh tani. Namun, setelah habis masa panen mereka masih memiliki pekerjaan yaitu beternak lele, beternak kambing, membuat keset, sebagian ada yang membuat tasbih dan apabila ada pesanan mereka mengerjakan produksi batik ciprat.

2. Pendapatan meningkat

Konsep pendapatan warga tunagrahita dibagi menjadi tiga, yaitu harian, triwulan dan tahunan. Dapat dipahami lebih jelas melalui uraian berikut:

a. Harian

Warga tunagrahita mendapatkan penghasilan harian dari kerajinan yang mereka buat. Dari kerajinan keset, mereka mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000 per keset. Lalu dari tasbih mendapatkan upah Rp. 2.500 per biji. Pendapatan mereka dapat dikalkulasikan berdasarkan jumlah kerajinan yang bisa mereka selesaikan.

b. Triwulan

Pendapatan triwulan didapatkan dari beternak lele. Ikan lele dapat dipanen dalam jangka waktu tiga bulan. Setiap panen, keluarga

tunagrahita bisa menghasilkan uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000.

c. Tahunan

Penghasilan dari beternak kambing dapat mereka rasakan setiap tahun, apabila kambing yang dipelihara telah berkembangbiak.

3. Dapat memenuhi kebutuhan

Setelah diberlakukannya program pemberdayaan, kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sembako, bumbu masak dan seperangkatnya bisa mereka penuhi.

Sesuai dengan teori Edi Suharto, dalam bukunya Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Salah satu bentuk dari dampak ekonomi adalah kemudahan masyarakat mengakses sumber-sumber ekonomi. Sumber ekonomi alam sudah dapat diakses melalui program pemberdayaan peternakan. Sumber ekonomi yang berasal dari manusia juga sudah didapatkan melalui kerajinan tangan keset, tasbih dan batik ciprat.

Keberhasilan dari pemberdayaan ekonomi pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan secara garis besar sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan warga tunagrahita yang mengalami peningkatan daripada sebelum adanya pemberdayaan. Bahkan saat ini, warga tunagrahita sudah memiliki pendapatan harian, triwulan dan tahunan.

Selain itu, pergeseran okupasi juga sudah terjadi. Matapencaharian yang awalnya hanya sebagai buruh tani saat ini sudah memiliki profesi

lain sebagai peternak dan pembuat kerajinan. Dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, peningkatan pendapatan dan pergeseran okupasi menjadi penentu suatu masyarakat dikatakan berdaya secara ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah tentang model pemberdayaan pada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Model pemberdayaan masyarakat kepada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo menggunakan pendekatan *top down*. Adapun jenis usaha dalam program pemberdayaan ini antara lain adalah ternak lele, ternak kambing, pembuatan kerajinan tangan tasbih, pembuatan kerajinan tangan keset dan produksi batik ciprat. Dalam hal ini, warga tunagrahita berperan sebagai pelaksana saja. Sedangkan perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak pemberdaya. Bahkan dimana, bagaimana dan kapan pemberdayaan dilakukan, diputuskan oleh pemberdaya secara sepihak. Pada awalnya, pemberlakuan model pemberdayaan seperti ini cukup efektif, namun untuk jangka panjang ternyata model pemberdayaan seperti ini tidaklah efektif. Saat ini ada warga tunagrahita yang mulai enggan untuk melakukan pemberdayaan, hanya mau datang ke balai pelatihan apabila ada pemberitahuan bantuan datang. Ada juga yang tetap melakukan

pemberdayaan seperti sebelumnya, namun bekerja dengan asal-asalan, sehingga kinerjanya menurun.

2. Dampak ekonomi yang dirasakan cukup terlihat. Pergeseran okupasi terjadi, dari yang awalnya warga tunagrahita hanya bekerja sebagai buruh tani dan pengangguran, saat ini sudah beralih profesi sebagai peternak dan pengrajin. Pendapatan pun sudah jauh meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya program pemberdayaan. Konsep pendapatan warga tunagrahita adalah harian, triwulan dan tahunan. Untuk penghasilan harian didapat dari kerajinan keset dan tasbih yang mampu mereka buat, penghasilan triwulan didapat dari panen ternak lele dan penghasilan tahunan didapat dari ternak kambing apabila kambingnya telah berkembang biak.

B. Saran

Warga penyandang keterbelakangan mental atau tunagrahita bukan merupakan beban. Mereka bisa hidup mandiri dan mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat normal adalah memberikan dukungan dan motivasi agar warga tunagrahita dapat bertahan hidup. Alternatif untuk membuat warga tunagrahita menjadi mandiri adalah dengan melakukan pemberdayaan. Maka dari itu, penulis sebagai peneliti dalam fenomena model pemberdayaan masyarakat tunagrahita, memberikan saran agar:

1. Bagi pemberdaya, memikirkan untuk mengganti model pemberdayaan melalui pendekatan *top down* menjadi *bottom up*. Meskipun dalam

prosesnya *bottom up* cenderung lebih lama, namun pendekatan *bottom up* dinilai efektif untuk jangka panjang. Selain itu karena *bottom up* menggunakan partisipasi sebagai kata kunci, sehingga jika menggunakan pendekatan *bottom up*, dinding komunikasi yang selama ini masih menjadi penghalang antara pemberdaya dengan warga tunagrahita bisa diminimalisir atau bahkan bisa diselesaikan.

2. Mempertimbangkan program pemberdayaan di Desa Karangpatihan untuk dikembangkan menjadi lebih banyak. Hal ini tentu saja selain untuk merangsang kemampuan berfikir warga tunagrahita, juga berguna sebagai upaya pemasaran. Jika produk yang dihasilkan warga tunagrahita semakin banyak baik secara kuantitas maupun ragamnya, maka jangkauan pemasarannya juga akan semakin luas. Tentunya hal tersebut juga akan berimbas kepada peningkatan pendapatan warga tunagrahita.
3. Program pemberdayaan yang sampai saat ini aktif dilakukan di Karangpatihan antara lain, pembuatan keset, pembuatan tasbih, ternak lele, ternak kambing dan produksi batik ciprat. Pada dasarnya, pelatihan yang dilakukan 1 minggu 2 kali terhadap masing-masing program pemberdayaan sudah bagus. Hanya saja, ada beberapa hal yang apabila diaplikasikan akan membuat program pemberdayaan di Desa Karangpatihan semakin berkembang. Pertama, saat ini pembuatan keset bagi warga tunagrahita yang dianggap mampu menyelesaikannya sendiri, diperbolehkan dibawa pulang untuk dilakukan di rumah. Akan lebih baik lagi jika semua warga tunagrahita diperbolehkan membawa pulang alat

dan bahan untuk membuat keset. Selain agar warga tunagrahita belajar menyelesaikannya juga untuk meningkatkan pendapatan harian mereka, terlepas dari berapa keset yang mampu diselesaikan dalam kurun waktu satu minggu. Kedua, dalam pembuatan tasbih, saat ini hanya untuk orang yang mampu berhitung. Hal ini akan lebih efisien apabila semua warga tunagrahita kategori ringan dan sedang diajari berhitung. Ketiga, pada program pemberdayaan ternak lele dan kambing sudah tidak ada pendampingan, karena mereka sudah dianggap mampu dalam beternak lele dan kambing. Akan lebih baik lagi apabila dilakukan pemeriksaan secara berkala, sehingga jika ada suatu hal yang dirasa kurang sesuai dan tidak benar maka bisa diperbaiki. Terakhir pada program pemberdayaan batik ciprat, saat ini hanya beberapa orang saja yang diikutkan berpartisipasi. Akan lebih baik apabila semua warga tunagrahita kategori ringan dan sedang diikutkan berpartisipasi. Banyak proses yang perlu dilalui dalam pembuatan batik ciprat, jadi apabila ada tunagrahita yang tidak bisa dalam proses pewarnaan, bisa dikhususkan pada proses pencucian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus sunnah 2015.
- Amila. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Andriana, Lutfia. "Kesejahteraan Sosial Tunagrahita". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Apriyanto, Nunung. *Seluk Beluk Tunagrahita Dan Strategi Pembelajarannya*, 11.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Arjianto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hadari, Nawawi dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University, 1994.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003.
- Hurairah, Abu. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora, 2008.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Payne, Malcolm. *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- Profil Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 2016.
- Profil Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 2018-2019.
- Rusdiyanto, Rian. "Pemberdayaan Penyandang Cacat Tunagrahita Oleh Yayasan Wahana Bina Karya Penyandang Cacat Di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhartini, dkk. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Suharto, Edi. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perubahan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jakarta: Kelompok Gramedia, 2008.

- Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Sujarwo. *Strategi Pembelajaran Orang Dewasa*. Makalah, 2015.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Sumadiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bin Arena Pariwisata, 1997.
- Surwanti, Arni. "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia". *Jurnal Manajemen & Bisnis*. Yogyakarta: 2014, 41-58.
- Sutarto, Joko. *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar Proses Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Unnes Press, 2007.
- Theresia, Aprillia dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademisi Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Semarang: 2011, 15-27.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho D. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2007.